

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DESENTRALISASI FISKAL,  
DAN RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS PADA PAD KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018-2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANISA JULIARTI**

**NIM. 181310171**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DESENTRALISASI FISKAL,  
DAN RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS PADA PAD KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018-2020)**

**Tanggung Jawab Yuridis Kepada:**

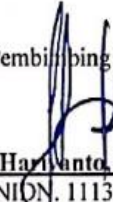
**ANISA JULIARTI**  
NIM. 181310171

**Program Studi Manajemen**

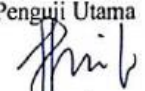
**Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian  
Skripsi/Komprehensif  
Pada Tanggal: 31 Agustus 2022**

**Majelis Penguji:**

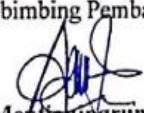
Pembimbing Utama

  
**Dedi Hariyanto, S.E., M.M**  
NIDN. 1113117702


Penguji Utama

  
**Heni Safitri, S.E., M.M**  
NIDN. 1103028901

Pembimbing Pembantu

  
**Farah Juniati Mediantingrum, S.E., M.Fc.Dev.,**  
NIDN. 1124069401

Penguji Pembantu


  
**Fuad Ramdhan Ryanto, S.E.Ak., M.Ak**  
NIDN. 1118039101

Pontianak, 31 Agustus 2022

Disahkan Oleh:

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

  
**Dedi Hariyanto, S.E., M.M**  
NIDN. 1113117702

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia dalam menempuh dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020)”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan perhatian baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Dedi Hariyanto, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan nasihat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Heni Saftri, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Neni Triana Maswardi, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.

5. Ibu Farah Juniati Meutianingrum, S.E., M.Ec.Dev., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, Sekretaris, Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah, beserta staf-staf BPKAD Kabupaten Kubu Raya yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Segenap Sivitas Akademika Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemudahan dalam administrasi bagi penulis dari menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Surahman dan Ibu Syamsiah selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan terbesar, nasihat dan do'a serta dukungan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik tercinta Qori Afifah dan Arif Hidayat yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Viranza, Lina, Tri, Chintya, Ulfia, Laili, Esy, Septi, Destira beserta teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen khususnya Kelas 09 Angkatan 2018 yang selalu memberi semangat dan menjadi *positive vibes* dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan dalam menyusun skripsi.

Pontianak, 15 Juni 2022  
Penulis

**Anisa Juliarti**  
**NIM. 181310171**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 yang diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas menghasilkan rata-rata sebesar 101,12% yang artinya tergolong kriteria sangat efektif. Selanjutnya, rata-rata Rasio Efisiensi yaitu sebesar 86,08% yang artinya tergolong kriteria efisien. Kemudian, Rasio Desentralisasi Fiskal yaitu sebesar 11,08% yang artinya tergolong kriteria kurang. Dan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan daerah yaitu sebesar 79,13% yang artinya tergolong kriteria sangat tinggi. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya harus lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD, sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah dalam upaya penyelenggaraan desentralisasi fiskal di tahun yang akan datang.

**Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi, Ketergantungan Daerah**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II</b> <b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Otonomi Daerah .....	14
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	14
1. Pengertian APBD.....	14
2. Fungsi APBD.....	15
3. Prinsip-prinsip Dasar (Azas) Pengelolaan Anggaran Daerah ....	15
4. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	18
3. Upaya Meningkatkan PAD .....	18
D. Laporan Keuangan .....	18
1. Pengertian Laporan Keuangan .....	18
2. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran .....	19
3. Alasan Pemerintah Daerah Mempublikasikan Laporan Keuangan.....	20
4. Tujuan Laporan Keuangan .....	20
5. Manfaat Laporan Keuangan .....	20
E. Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Ketergantungan Keuangan Daerah .....	22
1. Efektivitas.....	22
2. Efisiensi.....	24
3. Desentralisasi.....	26
4. Ketergantungan Keuangan Daerah .....	28
<b>BAB III</b> <b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Kubu Raya .....	30
B. Visi dan Misi .....	31

	C. Struktur Organisasi .....	32
	D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	47
	A. Analisis Efektivitas .....	47
	B. Analisis Efisiensi .....	49
	C. Analisis Desentralisasi Fiskal .....	52
	D. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah .....	54
BAB V	PENUTUP .....	57
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	57
	Daftar Pustaka .....	59
	Lampiran.....	62



## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran PAD, Realisasi PAD dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 (Dalam Rupiah) .....	4
Tabel 1.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Realisasi Pendapatan dan Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 (Dalam Rupiah) .....	5
Tabel 1.3	Kriteria Pengambilan Keputusan Efektivitas .....	12
Tabel 1.4	Kriteria Pengambilan Keputusan Efisiensi .....	12
Tabel 3.1	Pejabat Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 .....	34
Tabel 4.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perhitungan Efektivitas Anggaran PAD dan Realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 .....	48
Tabel 4.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perhitungan Efisiensi Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 .....	51
Tabel 4.3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perhitungan Desentralisasi Fiskal Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 .....	53
Tabel 4.4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perhitungan Ketergantungan Keuangan Daerah Realisasi Pendapatan Transfer dan Realisasi Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020.....	55

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	10
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	33

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2018 .....	62
Lampiran 2.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2018 .....	63
Lampiran 3.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2019 .....	64
Lampiran 4.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2019 .....	65
Lampiran 5.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2020 .....	66
Lampiran 6.	Laporan Keuangan APBD Kab. Kubu Raya Tahun 2020 .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan kondisi otonomi daerah adalah rangkaian dari keinginan agar Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola Pemerintahan dengan baik. Keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah salah satu yang harus diperhatikan. Aspek pengelolaan keuangan daerah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabilitas agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran terhadap kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung

dapat menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran terkait program-program yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat dengan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Terdapat dua komponen utama dalam APBD yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan belanja daerah adalah suatu perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi dan kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dasar usaha kemandirian suatu daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Sumber atau komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Kubu Raya mengelola potensi daerahnya sendiri melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Setiap sektor memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga pengelolaan harus dilakukan dengan maksimal guna mendukung pergerakan perekonomian dalam meningkatkan penerimaan PAD. Dengan adanya PAD dapat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. BPKAD Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk membangun sistem dan tata kelola keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel (*Good Governance*).

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terhadap APBD adalah salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan dapat menggunakan perhitungan Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Ketergantungan Keuangan Daerah. Dalam hal ini maka yang diperlukan untuk pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran atau yang biasa disebut dengan LRA.

Efektivitas merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi dengan cara diukur melalui tingkat pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan suatu hal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Desentralisasi merupakan suatu hal yang terlepas dari Pusat dimana dapat mengatur dan mengurus Daerahnya secara mandiri. Ketergantungan merupakan hal yang dapat diukur dengan seberapa besar pendapatan transfer yang diterima oleh Daerah dengan total pendapatan Daerah tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran atau yang disingkat dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dengan informasi yang disajikan melalui Laporan Realisasi Anggaran tersebut, maka bisa dijadikan acuan dalam mengevaluasi berbagai macam pengambilan keputusan.

Adapun ringkasan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah,**  
**dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**  
**Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dalam Rupiah)</b>	<b>Pencapaian Antara Anggaran &amp; Realisasi PAD (%)</b>
<b>2018</b>	168.170.819.996,00	184.531.274.752,15	1.140.511.991.712,00	109,72
<b>2019</b>	174.442.230.066,00	172.839.464.395,36	1.084.951.262.629,00	99,08
<b>2020</b>	160.118.773.169,57	151.009.789.228,78	964.995.503.675,00	94,31

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase pencapaian antara anggaran dan realisasi PAD mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimana persentase pencapaian pada Tahun 2018 sebesar 109,72%, kemudian pada Tahun 2019 mengalami penurunan 10,64% dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan 4,77%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komponen PAD yang menurun selama 2 tahun terakhir sehingga berdampak pada realisasi PAD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya. Besarnya realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih perlu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD dengan menggali lebih dalam potensi-potensi daerah guna meningkatkan PAD.

Adapun ringkasan data Realisasi Pendapatan Daerah dan Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Realisasi Pendapatan dan Realisasi Biaya Untuk Memperoleh**  
**Pendapatan (Belanja Daerah)**  
**Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan (Dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan (Belanja Daerah) (Dalam Rupiah)</b>	<b>Pencapaian antara Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Daerah (%)</b>
<b>2018</b>	1.577.257.039.764,53	1.335.361.557.533,21	84,66
<b>2019</b>	1.533.363.622.188,15	1.348.672.392.417,84	87,95
<b>2020</b>	1.477.080.851.351,36	1.265.124.730.428,43	85,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan tidak melebihi realisasi pendapatan, namun persentase antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan mengalami kenaikan di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Pada Tahun 2018 persentase sebesar



84,66%, kemudian pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,29%, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,3%. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020)**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pada PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020?

## **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
2. Periode penelitian yaitu Tahun 2018 sampai dengan 2020.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pada PAD Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2018 sampai dengan 2020.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan sekaligus guna mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

## 2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam membentuk kebijakan, terutama untuk mengelola Keuangan Daerah yaitu melalui pengembangan Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PAD.

## 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Putra (2018:2): “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”.

Menurut Mahsun (2013:191): “Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Menurut Putra (2018:64): “Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan”.

Menurut Firdausy (2017:18): “Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas Pemerintahan dan pelayan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang Pemerintahan yang dilimpahkan”.

Menurut Mahmudi (2019:140): “Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qur’ani dan Panggiarti (2021) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisien 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian/aktivitas belanja tergolong tidak efisien, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah, rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal

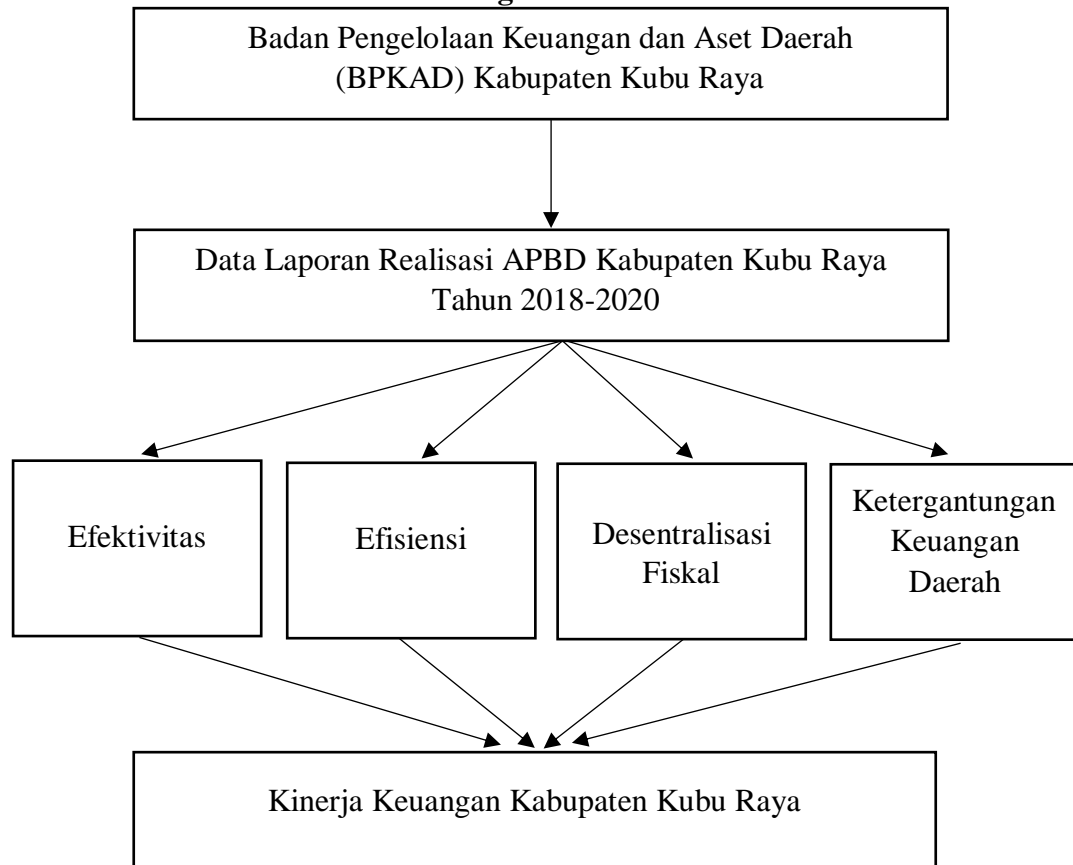
24,66% tergolong kurang harmonis serta rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah/tidak mandiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2020) yang berjudul “Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Rosidah (2021) yang berjudul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efektivitas tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 100%. Kinerja keuangan Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya kurang dari 100%. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong positif. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif.

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:16): “Penelitian Deskriptif diarahkan untuk mengetahui nilai variabel indenpenden (baik satu variabel maupun lebih) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lain”.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder dengan menggunakan Metode Dokumentasi. Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:78) “Data Sekunder adalah data dokumentasi, data yang diterbitkan atau data yang digunakan oleh organisasi”.

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:78): “Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data”.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020.

## 3. Alat Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Menghitung Rasio Efektivitas

Dalam penelitian ini Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019:141)

b. Menghitung Rasio Efisiensi

Dalam penelitian ini Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
<100%	Efisien
=100%	Efisien Berimbang
>100%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahsun, 2013:187)

c. Menghitung Rasio Desentralisasi Fiskal

Dalam penelitian ini Desentralisasi Fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

(Mahmudi, 2019:140)

d. Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

(Mahmudi, 2019:140)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada PAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020)” maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berada dikategori sangat efektif.
2. Rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berada dikategori efisien.
3. Analisis dan perhitungan dari rasio desentralisasi keuangan daerah membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berada dikategori kurang sehingga masih harus ditingkatkan lagi.
4. Analisis dan perhitungan dari rasio ketergantungan keuangan daerah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya masih sangat tinggi dalam penerimaan pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD terutama sumber penerimaan

pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan pada sumber pendapatan lain berkurang serta upaya penyelenggaraan desentralisasi di tahun yang akan datang segera tercapai.

2. Dengan pencapaian tingkat efisiensi yang tergolong kriteria efisien diharapkan tetap mempertahankan konsistensinya di tahun-tahun berikutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan menambah atau menggunakan rasio keuangan daerah lainnya, sehingga hasil penelitian yang ada dapat dijadikan bahan perbandingan dan menambah referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. UB Press, Malang.
- Azimi, Aulia. 2019. *Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas dan Kemampuan Fiskal*. Cetakan Pertama. IAIN Pontianak Press, Pontianak.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hakim, dan Umi Rosidah. 2021. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 4 (1), 68 – 88.
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, Umi Rahma Dhany, Siswadi Sululing, Maya Novitasari, Joni Hendra, Siti Amerieska, Suryaningsi, Tatik Amani, Sanusi Ariyanto, Desak Nyoman Sri Werastuti, dan Saiful Muchlis. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Hidayat, Rahmat. 2014. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Gramata Publishing, Bekasi.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Cetakan Pertama. Deepublish, Yogyakarta.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Deepublish, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.
- Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Pandiva Buku, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta.
- Mahsun, Muhamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Keempat. BPF, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Cetakan Pertama. Uwais Inspirasi Indonesia, Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo.

- Nurkholis, dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press, Malang.
- Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Qur'ani, Salwa, dan Endang Kartini Panggiarti. 2021. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 5 (1), 60-70.
- Rakhmawati, Tri. 2017. *Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi*. Cetakan Pertama. LIPI Press, Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suryani, dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetakan Pertama. Deepublish, Yogyakarta.

- Zamzami, Faiz, Mukhlis dan Anissa Eka Pramesti. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Zukhri, Nizwan. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. Vol.5 (2), 143-149.

**LAMPIRAN 1**  
**LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SEMPAT DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	1.551.713.793.100,90	1.577.257.039.764,53	101,65	1.404.723.995.630,05
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	168.170.819.996,00	184.531.274.752,15	109,73	152.023.127.898,99
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	112.177.216.000,00	133.593.217.033,31	119,09	113.686.725.465,28
4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.414.833.500,00	9.374.653.868,50	111,41	10.900.974.165,00
4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.118.712.047,00	4.118.712.047,00	100,00	3.341.143.372,00
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	43.460.058.449,00	37.444.691.803,34	86,16	24.094.284.896,71
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	1.299.318.068.204,90	1.309.772.618.745,00	100,80	1.186.761.824.656,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.133.196.548.000,00	1.140.511.991.712,00	100,65	1.043.885.758.961,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	14.451.810.400,00	29.987.014.964,00	207,50	17.847.912.861,00
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	3.307.489.600,00	5.492.893.463,00	166,07	2.288.073.820,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	782.647.725.000,00	782.647.725.000,00	100,00	779.055.508.000,00
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	192.366.000.000,00	190.180.497.288,00	98,86	136.229.881.400,00
4.2.1.1.5	DAK Non Fisik - LRA	140.423.523.000,00	132.203.860.997,00	94,15	108.464.382.880,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	111.498.747.000,00	110.330.425.000,00	98,95	98.330.389.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	111.498.747.000,00	110.330.425.000,00	98,95	98.330.389.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	54.622.773.204,90	58.930.202.033,00	107,89	44.545.676.695,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	54.622.773.204,90	58.930.202.033,00	107,89	44.545.676.695,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	84.224.904.900,00	82.953.146.267,38	98,49	65.939.043.075,06
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	57.974.904.900,00	56.703.146.267,38	97,81	58.439.043.075,06
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
5	<b>BELANJA</b>	1.416.673.609.107,05	1.335.361.557.533,21	94,26	1.214.716.330.231,88
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.091.344.314.927,05	1.019.276.189.842,21	93,40	952.861.865.531,88
5.1.1	Belanja Pegawai	580.840.212.879,05	530.605.088.762,00	91,35	510.754.262.500,00
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.048.954.300,00	368.633.944.148,41	95,29	332.808.731.843,88
5.1.1.3	Belanja Bunga	128.200.000,00	128.166.666,80	99,97	0,00
5.1.1.5	Belanja Hibah	121.336.947.748,00	118.096.490.265,00	97,33	108.003.871.188,00
5.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.990.000.000,00	1.612.500.000,00	81,03	1.295.000.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	324.829.294.180,00	316.084.072.798,00	97,31	256.173.394.537,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.960.000.000,00	8.496.727.200,00	94,83	6.474.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.507.519.266,00	33.421.449.577,00	96,85	23.583.777.409,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.087.324.695,00	74.936.536.532,00	93,57	40.238.980.884,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2018

**LAMPIRAN 2**  
**LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2018**

NO. URUT	URATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.753.115.350,00	190.069.836.484,00	99,12	177.856.287.118,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.110.952.069,00	8.756.280.705,00	96,11	7.742.408.675,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	410.382.800,00	403.242.300,00	98,26	277.940.451,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	500.000.000,00	1.294.893,00	0,26	5.681.070.163,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	1.294.893,00	0,26	5.681.070.163,00
6	<b>TRANSFER</b>	209.048.478.700,00	202.885.563.448,00	97,05	188.508.191.700,00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	14.267.977.800,00	14.040.314.328,00	98,40	8.184.404.600,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13.497.281.600,00	13.281.390.768,00	98,40	7.416.391.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	770.696.200,00	758.923.560,00	98,47	768.013.600,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	194.780.500.900,00	188.845.249.120,00	96,95	180.323.787.100,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	193.780.500.900,00	187.845.249.120,00	96,94	179.323.787.100,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(74.008.294.706,15)	39.009.918.783,32	(52,71)	1.499.473.698,17
7	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
7.1.1	Penggunaan SILPA	86.008.294.706,15	86.002.286.638,15	99,99	90.481.710.048,06
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	5.510.170.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	74.008.294.706,15	74.002.286.638,15	99,99	84.971.540.048,06
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	113.012.205.421,47	0,00	86.471.013.746,23



Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2018



**LAMPIRAN 3**  
**LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI 2019	REALISASI (%)	REALISASI 2018
		2019	2018			
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	1,616,216,332,193.00	1,533,363,622,188.15	94.87	1,577,257,039,764.53	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	174,482,230,066.00	172,839,464,395.36	99.08	184,531,274,752.15	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	125,556,620,500.00	126,455,410,972.73	100.72	133,593,217,033.31	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9,377,693,500.00	7,660,087,470.00	81.82	9,374,653,868.50	
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3,814,712,897.00	3,814,712,897.00	100.00	4,116,712,647.00	
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	35,693,203,169.00	34,709,253,055.63	97.24	37,444,691,803.34	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	1,336,076,299,127.00	1,279,740,671,302.00	95.78	1,309,772,618,745.00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1,121,956,947,640.00	1,084,951,262,629.00	96.70	1,146,511,991,712.00	
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	32,513,661,000.00	18,507,199,500.00	56.92	29,987,014,984.00	
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	6,845,862,000.00	4,437,480,900.00	64.82	5,492,893,463.00	
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	810,859,494,000.00	810,859,494,000.00	100.00	782,647,725,000.00	
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	126,631,340,400.00	113,368,758,090.00	89.53	190,180,497,288.00	
4.2.1.5	DAK Non Fisik - LRA	145,107,590,240.00	137,779,330,039.00	94.95	132,203,860,997.00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	134,452,632,000.00	131,658,673,200.00	97.92	110,330,425,000.00	
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	134,452,632,000.00	131,658,673,200.00	97.92	110,330,425,000.00	
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	75,526,719,487.00	58,990,735,473.00	78.11	58,930,202,033.00	
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	75,526,719,487.00	58,990,735,473.00	78.11	58,930,202,033.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	4,140,000,000.00	4,140,000,000.00	100.00	0.00	
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4,140,000,000.00	4,140,000,000.00	100.00	0.00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	105,698,003,000.00	80,783,486,490.79	76.43	82,953,146,267.38	
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	95,215,143,000.00	70,300,626,490.79	73.83	56,702,146,267.38	
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	10,482,860,000.00	10,482,860,000.00	100.00	26,250,000,000.00	
5	<b>BELANJA</b>	1,492,872,939,779.48	1,348,672,392,417.84	90.34	1,335,361,557,533.21	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1,229,680,600,891.48	1,143,043,103,706.08	93.00	1,019,276,189,842.21	
5.1.1	Belanja Pegawai	590,770,549,540.93	551,544,479,713.59	93.36	530,605,088,762.00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	419,300,519,350.55	388,591,369,254.72	92.68	368,833,944,148.41	
5.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	128,166,666.80	
5.1.5	Belanja Hibah	216,659,532,000.00	201,030,054,737.77	92.79	118,096,490,265.00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,350,000,000.00	1,876,400,000.00	79.85	1,612,500,000.00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	263,292,338,888.00	205,629,288,711.76	78.10	316,084,072,799.00	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3,341,415,000.00	3,255,177,325.00	97.42	6,496,727,200.00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2019



**LAMPIRAN 4**  
**LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2019**

5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,599,975,779.00	41,882,270,566.00	78.14	33,421,449,577.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93,691,283,540.00	88,194,430,293.42	94.13	74,936,536,532.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	104,217,606,095.00	65,022,873,496.34	62.39	190,869,836,484.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,826,938,914.00	6,756,722,471.00	86.33	8,756,280,765.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	615,139,560.00	517,814,560.00	84.18	403,242,300.00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	500,000,000.00	0.00	0.00	1,294,893.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	500,000,000.00	0.00	0.00	1,294,893.00
6	<b>TRANSFER</b>	232,323,701,200.00	231,569,588,200.00	99.68	202,885,563,448.00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	12,239,546,500.00	12,213,858,500.00	99.79	14,040,314,328.00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11,409,583,800.00	11,385,663,800.00	99.79	13,281,390,768.00
6.1.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	829,962,700.00	828,194,700.00	99.79	758,923,560.00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	220,084,154,700.00	219,355,729,700.00	99.67	188,845,249,120.00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219,084,154,700.00	218,355,729,700.00	99.67	187,845,249,120.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,000,000,000.00	999,971,000.00	100.00	1,000,000,000.00
7	<b>PEMBAYARAN</b>	(108,980,128,786.48)	(46,878,358,439.63)	43.02	39,009,918,783.32
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	112,980,128,786.48	112,956,668,786.48	99.98	86,002,286,638.15
7.1.1	Penggunaan SIPA	112,980,128,786.48	112,956,668,786.48	99.98	86,002,286,638.15
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	100.00	12,000,000,000.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	11,000,000,000.00
	<b>PEMBAYAN NETTO</b>	108,980,128,786.48	108,956,668,786.48	99.98	74,002,286,638.15
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0.00	62,078,310,356.79	0.00	113,012,205,421.47
	<b>BUPATI KUBU RAYA</b>				
	<b>MUDA MAHENDRAWAN</b>				

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2019

## LAMPIRAN 5

### LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBU RAYA TAHUN 2020



Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
Laporan Realisasi Anggaran  
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2020 dan 2019

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Reff.	31 Desember 2020			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	109.881.417.866,59	108.258.139.705,97	98,52	126.455.410.972,73
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.007.389.540,29	6.536.273.588,00	72,57	7.860.087.470,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.148.708.997,00	4.148.708.997,00	100,00	3.814.712.897,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	37.081.256.765,69	32.066.666.937,81	86,48	34.709.253.055,63
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>160.118.773.169,57</b>	<b>151.009.789.228,78</b>	<b>94,31</b>	<b>172.839.464.395,36</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>5.1.1.2.1</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak		979.847.236.000,00	964.995.503.675,00	98,48	1.084.951.262.629,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		23.440.526.000,00	18.753.552.535,00	80,00	18.507.199.600,00
Dana Alokasi Umum		6.115.009.000,00	5.875.097.272,00	96,08	4.437.480.900,00
Dana Alokasi Khusus		729.912.591.000,00	726.710.379.000,00	99,56	810.858.494.000,00
DAK Non Fisik		82.800.646.000,00	75.098.828.963,00	90,70	113.368.758.090,00
Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya	5.1.1.2.2	137.578.464.000,00	138.557.645.905,00	100,71	137.779.330.039,00
Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	131.658.673.200,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.3</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak		73.934.062.461,23	73.961.016.713,00	100,04	58.990.735.473,00
Dana Bagi Hasil Lainnya		73.934.062.461,23	73.961.016.713,00	100,04	58.990.735.473,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	4.140.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.055.781.298.461,23</b>	<b>1.040.956.520.388,00</b>	<b>98,60</b>	<b>1.279.740.671.302,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
Pendapatan Hibah		101.599.130.929,69	91.442.321.273,76	90,00	70.300.626.490,79
Pendapatan Lainnya		193.671.623.000,00	193.672.220.460,82	100,00	10.482.860.000,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>295.270.753.929,69</b>	<b>285.114.541.734,58</b>	<b>96,56</b>	<b>80.783.486.490,79</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.511.170.825.560,49</b>	<b>1.477.080.851.351,36</b>	<b>97,74</b>	<b>1.533.363.622.188,15</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	569.100.935.482,86	544.999.216.271,81	95,76	551.544.479.713,59
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	382.073.426.014,60	360.522.845.386,24	94,36	388.591.369.254,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2020

**LAMPIRAN 6**  
**LAPORAN KEUANGAN APBD KAB. KUBURAYA TAHUN 2020**

Uralan	Reff.	31 Desember 2020			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2019
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	216.217.913.950,00	209.086.609.337,45	96,70	201.030.854.737,77
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.000.000.000,00	993.300.000,00	99,33	1.876.400.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.168.392.275.447,46</b>	<b>1.115.601.970.995,50</b>	<b>95,48</b>	<b>1.143.043.103.706,08</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	3.255.177.325,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	39.145.398.349,78	37.100.325.065,00	94,78	41.882.270.566,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	65.684.352.400,00	59.518.106.300,00	90,61	88.194.430.293,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	51.869.303.120,00	36.139.142.813,93	69,67	65.022.873.496,34
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.339.259.641,00	7.257.645.816,00	87,03	6.756.722.471,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	370.000.000,00	368.350.000,00	99,55	517.814.560,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>165.408.313.510,78</b>	<b>140.383.569.994,93</b>	<b>84,87</b>	<b>205.629.288.711,76</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	16.139.060.416,00	9.139.189.438,00	56,63	0,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		<b>16.139.060.416,00</b>	<b>9.139.189.438,00</b>	<b>56,63</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.349.939.649.374,24</b>	<b>1.265.124.730.428,43</b>	<b>93,72</b>	<b>1.348.672.392.417,84</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1	11.176.173.607,11	11.176.172.675,00	99,99	12.213.858.500,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.1	211.135.025.600,00	211.129.940.600,00	99,99	219.355.729.700,00
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>222.311.199.207,11</b>	<b>222.306.113.275,00</b>	<b>99,99</b>	<b>231.569.588.200,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.572.250.848.581,35</b>	<b>1.487.430.843.703,43</b>	<b>94,61</b>	<b>1.580.241.980.617,84</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(61.080.023.020,86)</b>	<b>(10.349.992.352,07)</b>	<b>16,94</b>	<b>(46.878.358.429,69)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>				
Penggunaan SILPA		62.080.023.020,86	62.078.310.356,79	99,99	112.956.668.786,48
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>62.080.023.020,86</b>	<b>62.078.310.356,79</b>	<b>99,99</b>	<b>112.956.668.786,48</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>61.080.023.020,86</b>	<b>62.078.310.356,79</b>	<b>101,63</b>	<b>108.956.668.786,48</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>51.728.318.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.078.310.356,79</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Kubu Raya, 2020